



BUKU SAKU

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAPPEDA KOTA TANGERANG



BUKU SAKU

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penulis

Noor Shaky Iskandar

Kontributor

Widi Hastuti, ST., M.Sc

Agus Suhendar, S.IP., M.Si

Retnayu Prasetyanti, SAP., MAP

Rafly Pirmansyah, S.E

BAPPEDA KOTA TANGERANG

Jl. Satria - Sudirman No.1, RT.002/RW. 001, Sukaasih,
Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15111

2023

DAFTAR ISI

1. Apa itu Perencanaan Pembangunan?	1
2. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?	3
3. Siapakah yang merencanakan pembangunan?	5
4. Apakah “pembangunan” hanya tentang pembangunan jalan dan gedung?	7
5. Apakah masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan?	9
6. Apa itu RPJP, RPJM dan RKP?	11
7. Apa itu Renstra dan Renja?	13
8. Apa itu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)?	15
9. Pendekatan apa yang digunakan dalam perencanaan pembangunan?	17
10. Apa itu Pendekatan Politik dalam perencanaan pembangunan?	19
11. Apa itu Pendekatan Teknokratik dalam perencanaan pembangunan?	21
12. Apa itu Pendekatan Partisipatif dalam perencanaan pembangunan?	23
13. Apa itu Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dalam perencanaan pembangunan?	25
14. Apa itu Pendekatan Bawah-Atas (bottom-up) dalam perencanaan pembangunan?	27
15. Ada berapakah tahapan perencanaan pembangunan	29

DAFTAR ISI

16. Apa itu tahap penyusunan rencana?	31
17. Apa itu tahap penetapan rencana?	33
18. Apa itu tahap pengendalian pelaksanaan rencana?	35
19. Apa itu tahap evaluasi pelaksanaan rencana?	37
20. Bagaimana tahapan perencanaan nasional dan daerah?	39
21. Apa dasar hukum dari perencanaan pembangunan di Indonesia?	41
22. Apa itu Keuangan Negara?	43
23. Siapakah yang berwenang untuk mengelola keuangan negara?	45
24. Apa itu penganggaran pembangunan?	47
25. Apa itu anggaran?	49
26. Darimanakah sumber pendanaan APBN?	51
27. Darimanakah sumber pendanaan APBD?	53
28. Apa dasar hukum penganggaran di Indonesia?	55
29. Bagaimanakah alur perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia?	57
30. Bagaimanakah proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah?	59



PERENCANAAN PEMBANGUNAN



1. Apa itu Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah upaya-upaya untuk mencapai kondisi yang lebih baik secara terencana demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan maka perlu adanya perencanaan pembangunan secara holistik dan berkeadilan (Siagian, 1994; Tjokromaidjojo, 1984)



“

Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara

”

- Sondang P Siagian



2. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangkamenengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (Undang-Undang 25 tahun 2004)



“

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk lakukan atau tidak lakukan

”

-Thomas R Dye

3. Siapakah yang merencanakan pembangunan

Ada 5 aktor pembangunan yang dapat ikut merencanakan pembangunan (Riyanto, 2018):

- a. Pemerintah
- b. Akademisi
- c. Sektor Swasta
- d. Masyarakat
- e. *Non-Governmental Organizations (NGO)*



“

Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial

”

- *United Nations*



4. Apakah “pembangunan” hanya tentang pembangunan jalan atau gedung?

Pembangunan diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan sifatnya, yaitu, Fisik dan Non fisik.

Pembangunan Fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Contohnya: irigasi; perumahan umum; jalan umum, penerangan jalan; rumah sakit; sekolah; dan lain-lain.

Pembangunan Non-Fisik adalah pembangunan yang secara kasat mata tidak terlihat Namun memiliki dampak yang besar dan berjangka panjang. Contohnya: pendidikan; kesehatan; ekonomi; sosial-budaya; dan politik.

“

Good Governance atau Tata Kelola Pemerintah yang Baik adalah manajemen pemerintahan yang solid, akuntabel, berdasarkan prinsip pada prinsip yang efisien, mampu mencegah korupsi baik politis maupun administratif

”

- *World Bank*

5. Apakah masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan?

Masyarakat merupakan salah satu dari aktor pembangunan. Masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan, salah satunya dalam perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa forum resmi yang diadakan oleh pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang diikuti masyarakat. Biasanya masyarakat memberikan usulan apa yang diinginkan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat. Potensi tersebut bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, demografis, budaya, dll.



“

Electronic Government (E-Government) merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, dan administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

”



6. Apa itu RPJP, RPJM, dan RKP?

Dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 menjelaskan RPJP, RPJM dan RKP sebagai berikut.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D). RPJP N/D ini memiliki jangka waktu 20 tahun. Jadi dokumen RPJP N/D memiliki berlaku selama 20 tahun (RPJPN 2025 – 2045 dan RPJPD menyesuaikan masing-masing daerah)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJM N/D). RPJM N/D ini memiliki jangka waktu 5 tahun sesuai dengan masa kepemimpinan presiden/kepala daerah terpilih. RPJM N/D ini nantinya akan mengacu kepada RPJP N/D dan Visi dan Misi dari Presiden dan Wakil Presiden/Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). RKP/D ini adalah jangka pendek, yang akan dilaksanakan secara tahunan (1 tahun). RKP/D ini akan mengacu pada RPJM N/D dan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

“

Inovasi merupakan penerapan
gagasan, proses atau alat untuk
mencapai hasil atau kinerja
yang lebih baik

”

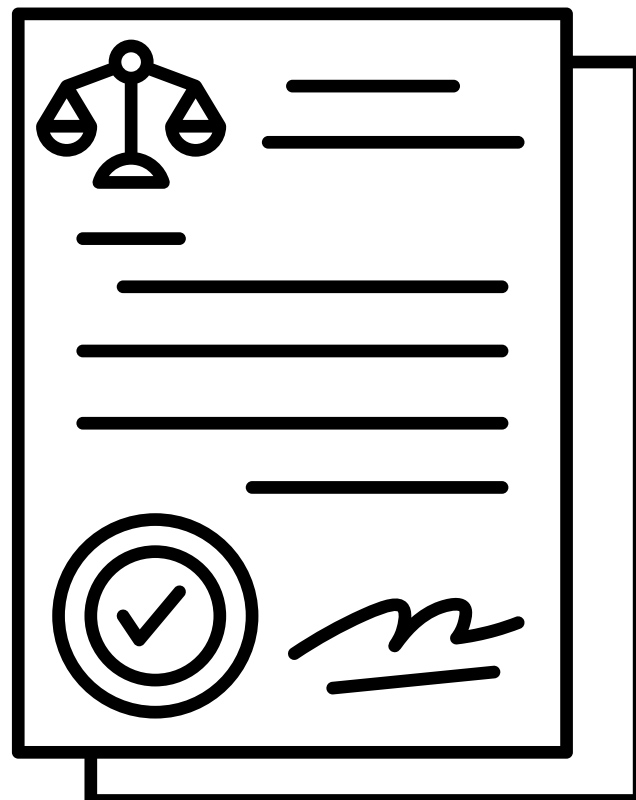
- Suciati



7. Apa itu Renstra dan Renja?

Renstra atau Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Kementerian dan Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 tahun

Renja atau Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Kementerian dan Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 tahun



//

Difusi inovasi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak – pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya

//

- Yogi Suwarno



8. Kapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Pusat dan Daerah?

Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP, RPJM, dan RKP.

Musrenbang RPJP Nasional/Daerah dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Musrenbang RPJM Nasional/Daerah dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah Presiden dan Kepala Daerah dilantik.

Musrenbang RKP dilaksanakan paling lambat bulan April

Musrenbang RKPD paling lambat bulan Maret.

“

Musyawarah Perencanaan
Pembangunan atau Musrenbang
adalah forum antarpelaku
dalam rangka menyusun
rencana pembangunan nasional
dan rencana pembangunan
daerah

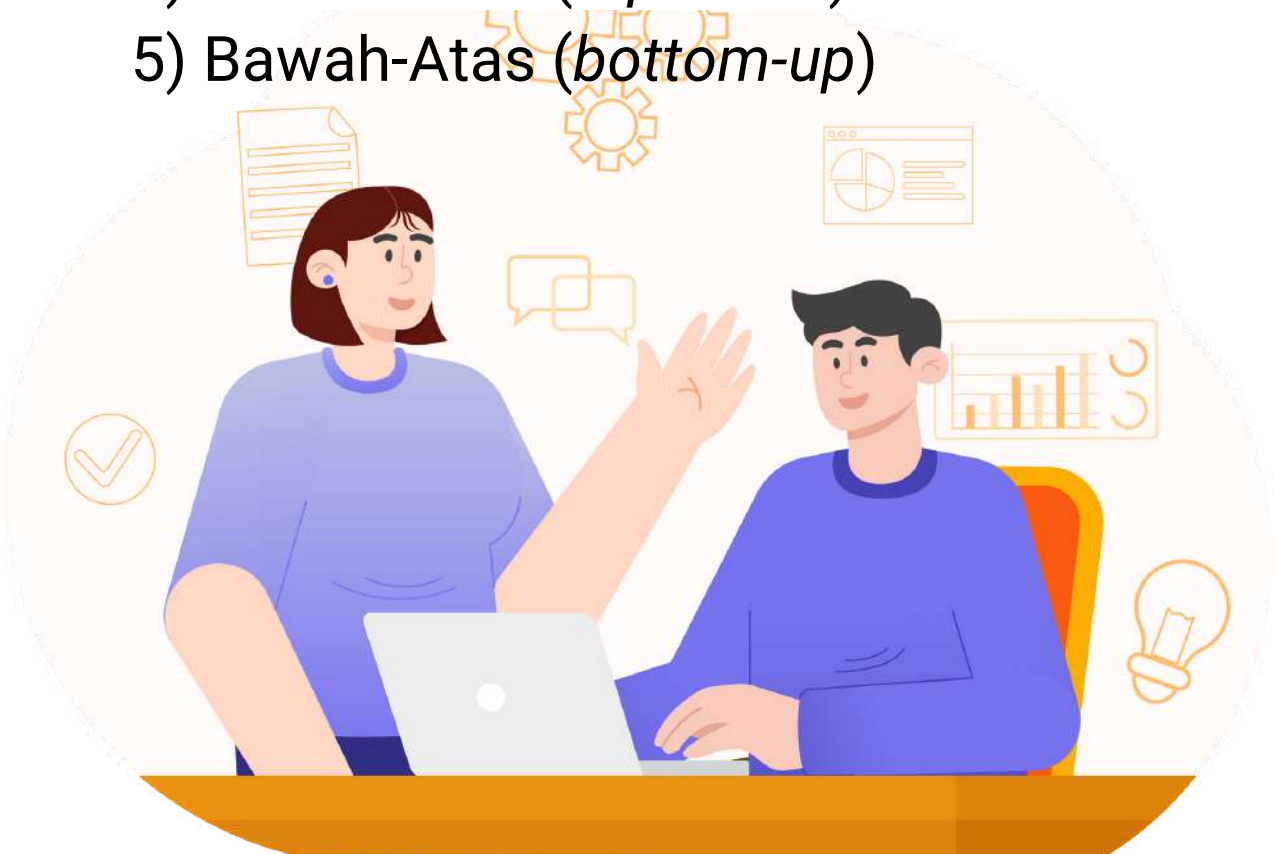
”

Undang-Undang No 25 Tahun
2004

9. Pendekatan apa yang digunakan dalam perencanaan pembangunan

Dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 terdapat 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) Politik
- 2) Teknokratik
- 3) Partisipatif
- 4) Atas-Bawah (*top-down*)
- 5) Bawah-Atas (*bottom-up*)



“ Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku, kelembagaan, hubunga interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya serta proses pembelajaran ”

- Nimas Maninggar, dkk



10. Apa itu Pendekatan Politik dalam perencanaan pembangunan?

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana. Karena Presiden/Kepala Daerah menawarkan Visi, Misi, dan Program-Program Pembangunan. Dan rakyat yang menentukan untuk memilih Presiden/Kepala Daerah berdasarkan yang mereka tawarkan kepada rakyat.



“

Daya Saing daerah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain

”

- Rinas Indiasuti



11. Apa itu Pendekatan Teknokratik dalam perencanaan pembangunan?

Pendekatan Teknokratik adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



//

Kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya) secara turun temurun yang memiliki manfaat kekinian termasuk sebagai penentu daya saing

//

- Delu Pingge



12. Apa itu Pendekatan Partisipatif dalam perencanaan pembangunan?

Pendekatan Partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Dengan adanya partisipasi dari *stakeholders* maka akan mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki



“

Industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berbasis budaya dan talenta individual yang berpeluang untuk menyerap tenaga kerja dan berpenghasilan dengan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual

”



13. Apa itu Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) dalam perencanaan pembangunan?

Pendekatan *Top-Down* adalah pendekatan yang berdasarkan dengan hirarki pemerintahan. Yang berarti *Top-Down* merupakan perencanaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah ke Masyarakat

“

Pelayanan Publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu Rumpunan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik

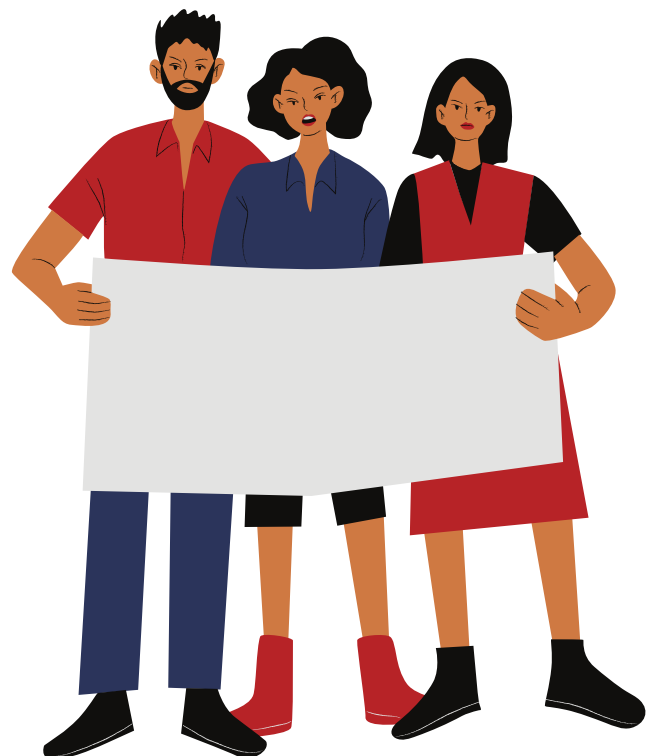
”

- Pasolong



14. Apa itu Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up) dalam perencanaan pembangunan?

Pendekatan *Bottom-Up* adalah pendekatan yang berdasarkan dengan hirarki pemerintahan. Yang berarti *Bottom-Up* merupakan perencanaan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat atau dari Masyarakat ke Pemerintah Daerah



“

Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat

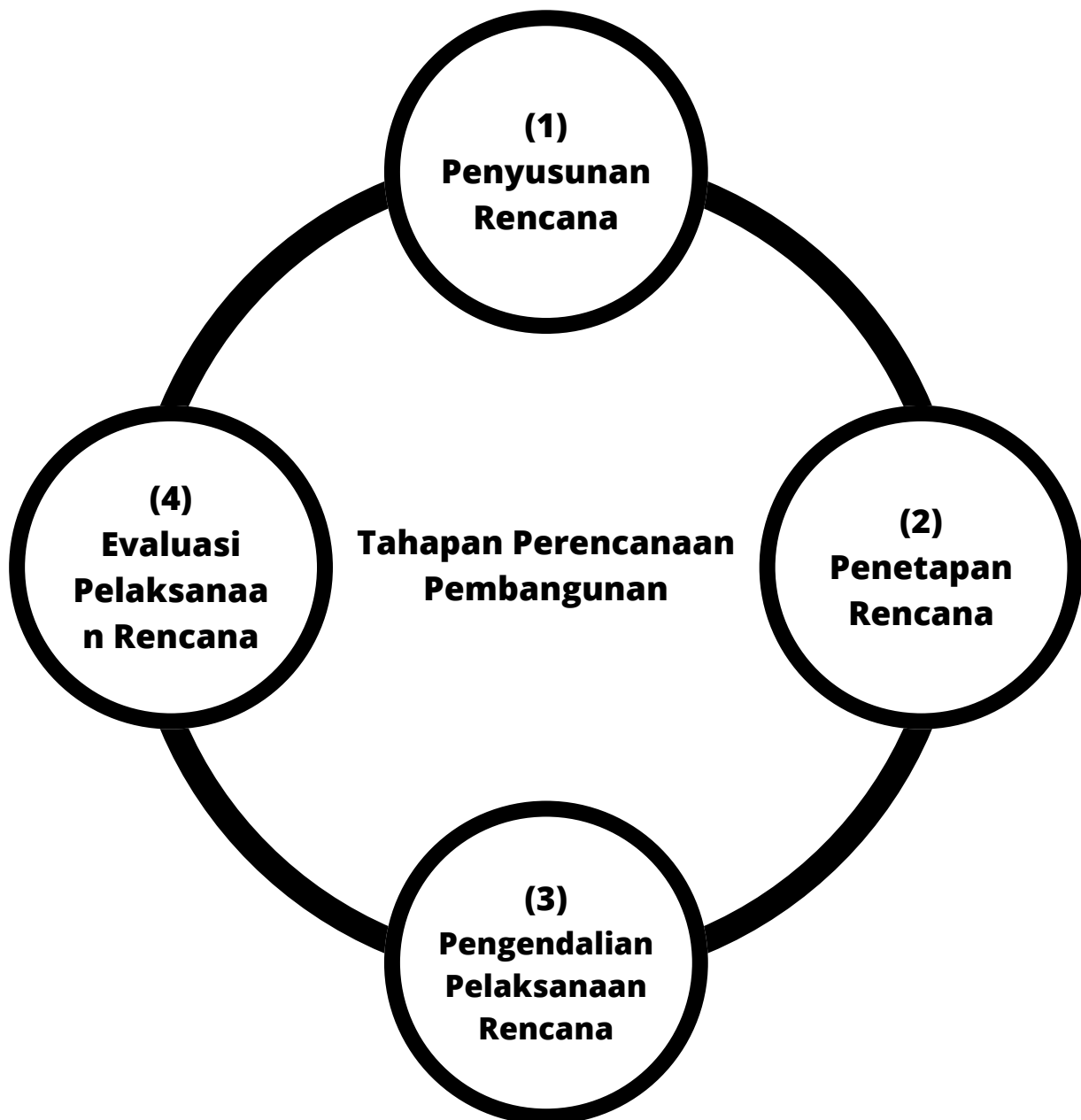
”

- Freddy



15. Ada berapakah tahapan dalam perencanaan pembangunan?

Perencanaan pembangunan memiliki 4 tahapan yakni:



“

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan BUMN/D

”

- Perpres Nomor 89 tahun 2021



16. Apa itu tahap penyusunan rencana?

Tahap penyusunan rencana adalah tahapan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana. Tahapan ini terdiri dari 4 langkah:

- 1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur**
- 2) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan**
- 3) Melibatkan masyarakat dan menelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan**
- 4) Penyusunan rancangan akhir rencana Pembangunan**

“ Mal-administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang bertanggungjawab ”

- Ombudsman RI



17. Apa itu tahap penetapan rencana?

Tahap penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah



“ Modernisasi merupakan sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah lebih baik ”

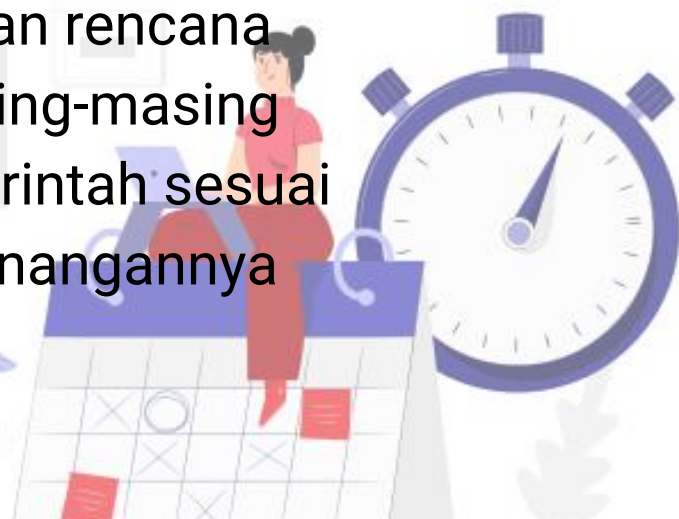
- Joan Hesti



18. Apa itu tahap pengendalian pelaksanaan rencana?

Tahap pengendalian pelaksanaan rencana adalah tahapan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana. Pelaksanaan rencana pembangunan akan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian oleh pimpinan dari masing-masing instansi pemerintah.

Selanjutnya, Menteri/Kepala Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya



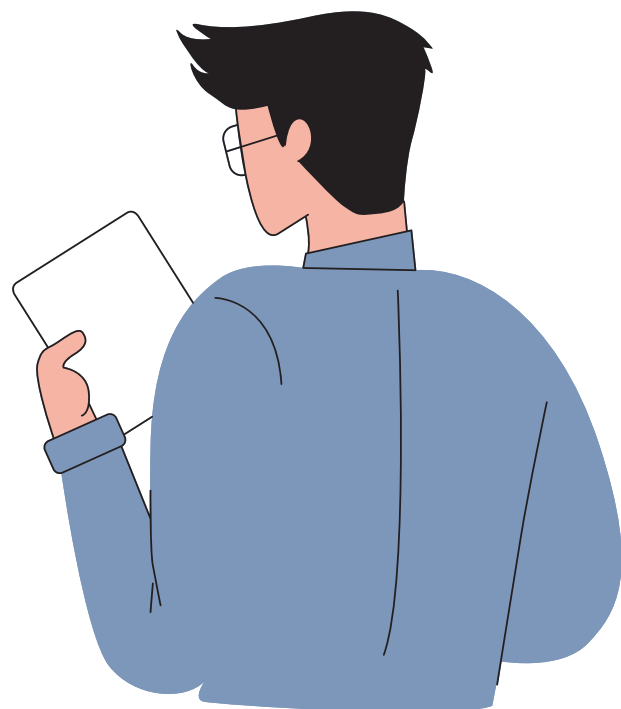
“ Globalisasi adalah intensifikasi atau percepatan hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia yang mengaitkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lain serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya ”

- Anthony Giddens



19. Apa itu tahap evaluasi pelaksanaan rencana?

Tahap evaluasi pelaksanaan rencana adalah tahapan dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan



“
Dependensi atau
ketergantungan adalah keadaan
di mana kehidupan ekonomi
negara-negara tertentu
dipengaruhi oleh perkembangan
dan ekspansi dari kehidupan
ekonomi negara-negara lain

”
- Theotonio Dos Santos



20. Bagaimanakah tahapan perencanaan pembangunan nasional dan daerah?

Tahapan	Keterangan (output dan penjelasan)	
	Nasional	Daerah
Penyusunan Rencana	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan RPJP Nasional Rancangan RPJM Nasional Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra - K/L) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan RPJP Daerah Rancangan RPJM Daerah Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)
Penetapan Rencana	<ul style="list-style-type: none"> UU tentang RPJP Nasional Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional Peraturan Presiden tentang RKP Renstra-K/L Renja-K/L 	<ul style="list-style-type: none"> Perda tentang RPJP Daerah Peraturan Kepala Daerah tentang RPJM Daerah Peraturan Kepala Daerah tentang RKP Daerah Renstra SKPD Renja SKPD
Pengendalian Pelaksanaan Rencana	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh masing-masing pimpinan K/L Bappenas menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing K/L sesuai dengan tugas dan kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya
Evaluasi Pelaksanaan Rencana	<ul style="list-style-type: none"> K/L melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya Bappenas Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan K/L Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode berikutnya 	<ul style="list-style-type: none"> SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode berikutnya

Sumber: Wasono dan Maulana (2018)

“
Pembangunan manusia
merupakan proses perluasan
pilihan lebebasan berpolitik,
partisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat, pilihan untuk
berpendidikan, bertahan hidup
dan sehat serta menikmati
standar hidup layak

”

- Mahbub Ul Haq



21. Apa dasar hukum dari perencanaan pembangunan di Indonesia?

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Sumber: Wasono dan Maulana (2018)

“

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai Upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

”

- Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

22. Apa itu Keuangan Negara?

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003)



“

Energi terbarukan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka

”

- *International Energy Agency*



23. **Siapakah yang berwenang untuk mengelola keuangan negara**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa kewenangan pengelolaan keuangan negara adalah **Presiden** selaku Kepala Pemerintahan. Namun, Presiden tidak mengelola keuangan negara secara individu tetapi dikuasakan kepada:

- 1) **Dikuasakan kepada Menteri Keuangan**, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
- 2) **Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga** selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- 3) **Diserahkan kepada gubernur / bupati / walikota** selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan negara dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

“

Transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat

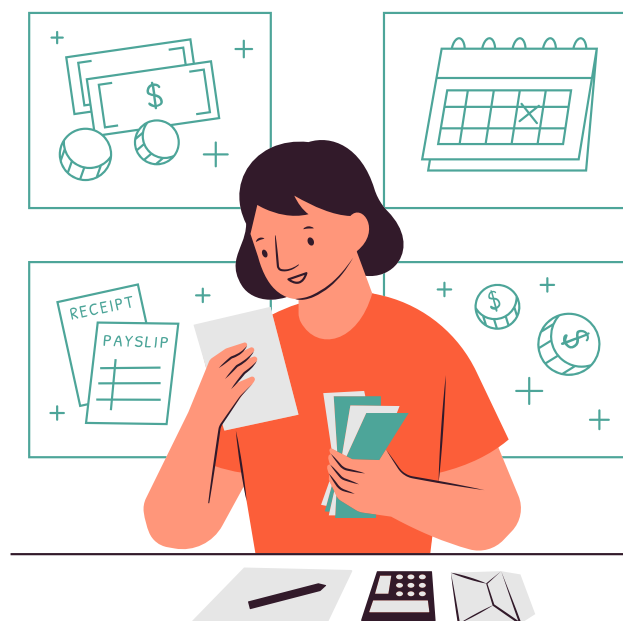
”

- Kotarba

24. Apa itu penganggaran pembangunan?

Penganggaran atau penyusunan anggaran pembangunan adalah proses penyusunan rencana keuangan negara yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu (1 tahun anggaran).

Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan (Mahsun, 2023)



//

Ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. kegiatan ekonomi hijau dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon

//

- *United Nations Environment Program*



25. Apa itu anggaran?

Anggaran adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran berisikan terjemahan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Dan anggaran dalam pemerintahan memiliki nama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APB N/D). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat/daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat



“

Program Strategis Nasional (PSN) adalah program dan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

”

- Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional



26. Darimanakah sumber pendanaan APBN?

Sumber penerimaan atau pendapatan APBN didapat dari beberapa sumber yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

- 1) Penerimaan Perpajakan
- 2) Penerimaan Bukan Pajak
- 3) Hibah



“

Group of Twenty atau G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan 1 kawasan ekonomi Uni Eropa. G20 bertujuan untuk membahas isu-isu terkait ekonomi global seperti stabilitas ekonomi global, mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan

”

- Kementerian Luar Negeri RI



27. Darimanakah sumber pendanaan APBD?

Sumber penerimaan atau pendanaan APBD didapat dari beberapa sumber, yakni:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Bagi Hasil
- 3) Dana Alokasi Umum
- 4) Dana Alokasi Khusus
- 5) Pendapatan Lain-Lain yang Sah



//

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan dokumen
akuntabilitas kinerja suatu
instansi atas rencana strategis
maupun rencana tahunan yang
telah disusun

//

- Permen PAN RB Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah



28. Apa dasar hukum penganggaran pembangunan di Indonesia?

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Sumber: Wasono dan Maulana (2018)

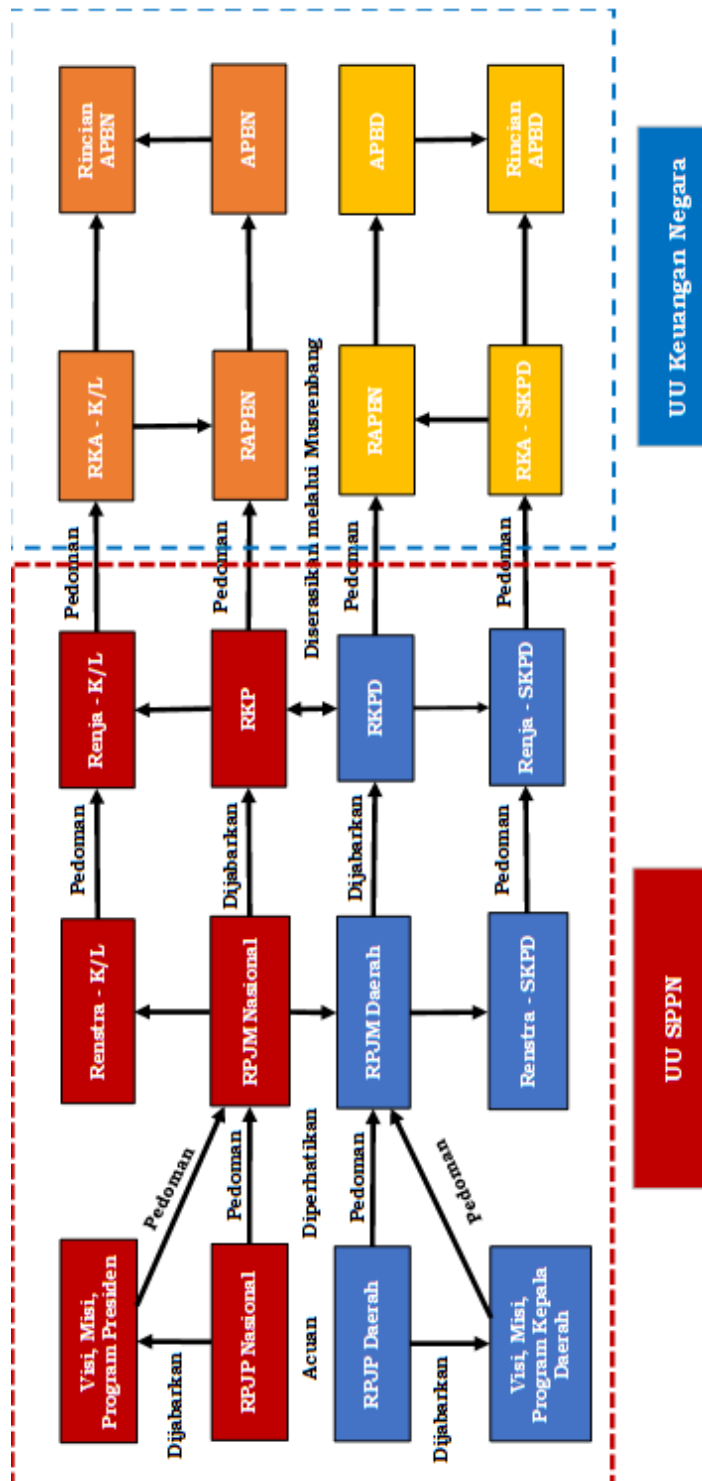


“ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL adalah kajian untuk mencari dampak dari kegiatan sebuah proyek baik positif maupun negatif. Fungsinya sebagai media guna mengkaji penyelenggaraan kegiatan dari sisi lingkungan hidup

”
- Ir. Dadang Purnama



29. Bagaimanakah alur perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia?



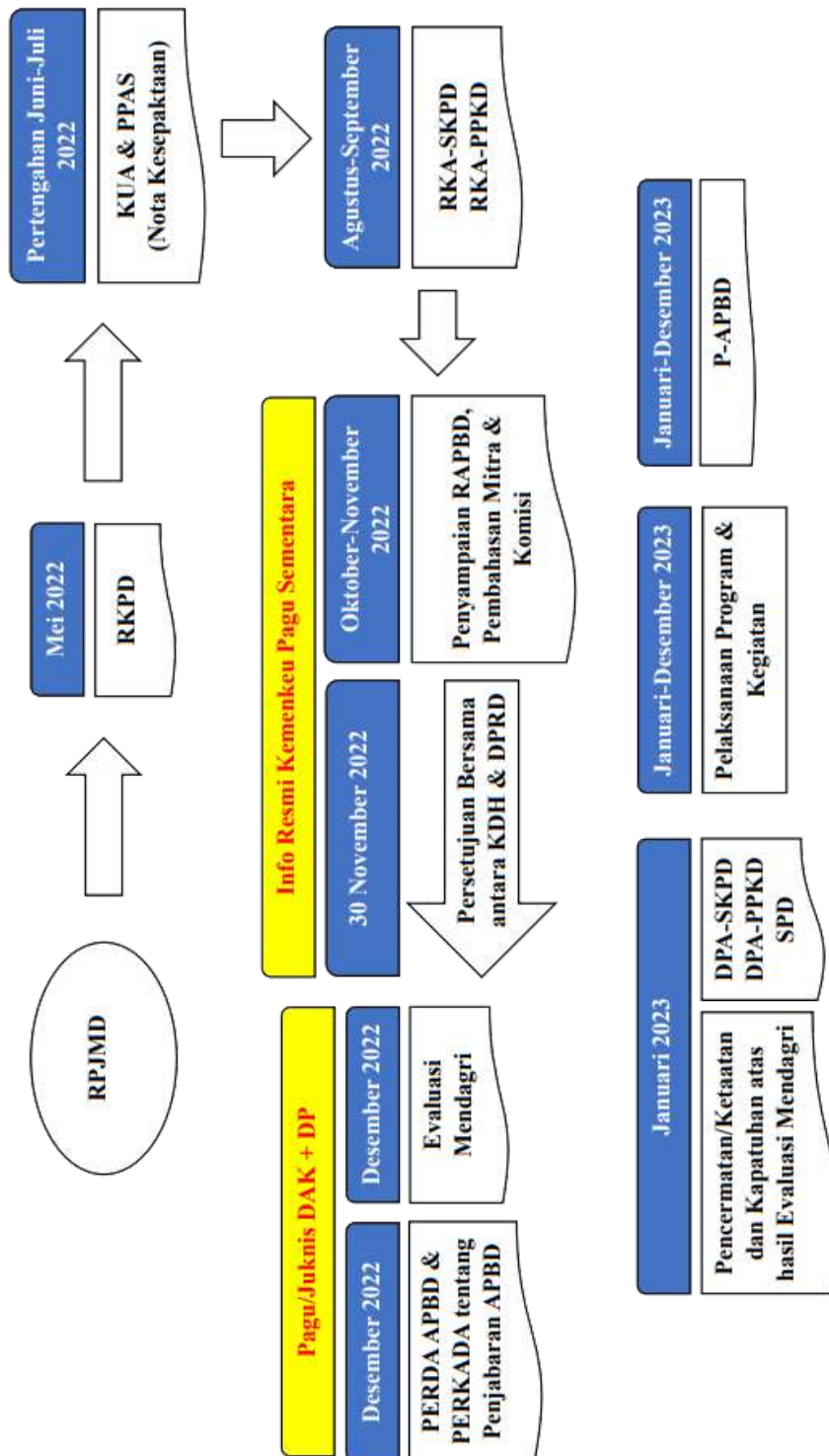
Sumber: Wasono dan Maulana (2018)

“ Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme

- Budiman Rusli



30. Bagaimanakah proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah?




Sumber: Wasono dan Maulana (2018)

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya., Sumantri, li (2016). Buku. Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik.
- Cahyana, Asep (2023). Berita. Ombudsman dan Pemulihan Kerugian Masyarakat.
- Dye, Thomas R (1995). Buku. Understanding Public Policy
- Hakim, Muhammad Alfian (2022). Artikel. Strategi Pentahelix pada Perencanaan Pariwisata di Desa Hegarmukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jurnal: Destinesia Jurnal Hospitaliti & Pariwisata.
- Indiastuti, Rina (2016). Buku. Daya saing Daerah: Konsep, Kajian dan Kebijakan.
- International Energy Agency (2023). Artikel. *Renewable2022: Analysis and Forecast to 2027*
- Kementerian Luar Negeri (2022). Berita. Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20 Tahun 2020.
- Mahsun, Mohamad (2023). Modul. Konsep Dasar Penganggaran. Pustaka Universitas Terbuka.
- Maninggar, Nimas., Suhandoyo., Kusharsanto, Zulfika S., Dea Maulidya (2021). Buku. Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah di Indonesia.
- Maiwan, Mohammad (2014). Artikel. Memahami Politik Globalisasi dan Pengaruhnya dalam Tata Dunia Baru: Antara Peluang dan Tantangan. Jurnal: Pamator.
- Pasolong, Harbani (2019). Buku. Teori Administrasi Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- Pingge, Heronimus Delu (2017). Artikel. Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah. Jurnal: Edukasi Sumba (JES).
- Rangkuti, Freddy (2017). Buku. Customer Care Evcellence: Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja.
- Suciati (2023). Buku. Pengertian dan Karakteristik Inovasi Pembelajaran.
- Suwarno, Yogi (2008). Buku. Inovasi di Sektor Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- United Nations (2023). Web Page. Sustainability.
- United Nations (1990). Artikel. What is Good Governance?
- United Nations Environment Programme (2023). Web Page. Ekonomi Hijau.
- Wasono, Agung., Maulana, Muhammad (2018). Working Paper. Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia.



 @bappedakotatangerang  bappeda@tangerangkota.go.id

 021 55768701